



Judul : DPR dan Pemerintah Disebut Merekayasa Hambalang
Tanggal : Jumat, 16 Nopember 2012
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : A6

DPR dan Pemerintah Disebut Merekayasa Hambalang

"Bahas dulu ke komisi DPR, bukan komentar ke publik."

JAKARTA — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat telah merampungkan telaah audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap proyek Hambalang. Salah satu alat kelengkapan Dewan ini menemukan adanya pelanggaran oleh pemerintah dan DPR dalam penetapan proyek pusat olahraga terpadu itu menjadi proyek tahun jamak. "Mereka secara bersama-sama melanggar. Dan para pejabat itu mengkreasikan proyek sampai proses tender," kata Ketua BAKN Sumarjati Arjoso saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu lalu.

Dia menjelaskan, perubahan penetapan proyek Hambalang di Sentul, Bogor, sebagai proyek tahun jamak pertama kali diprakarsai

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng pada 2010. Perubahan itu digagas bersama Sekretaris Kementerian Wafid Muharam dan para staf. Sebagai pengguna anggaran, Sumarjati melanjutkan, Menteri Andi tidak mungkin tak tahu adanya perubahan anggaran proyek dari Rp 125 miliar ke Rp 1,2 triliun. "Untuk pembangunan fisik proyek tahun jamak harus disetujui menteri. Menterinya harus tahu," kata Sumarjati.

BAKN juga menilai, kesalahan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan. Menurut Sumarjati, Kementerian Pekerjaan Umum membiarkan persetujuan penetapan tahun jamak tanpa diketahu menteri serta hanya disetujui Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Pengelola Teknis Kementerian. "Untuk proyek tahun jamak, harusnya disetujui menteri." Sedangkan Kementerian

Keuangan, dia melanjutkan, menyetujui proyek Hambalang itu dibiayai dalam tahun jamak, padahal belum ditandatangani Menteri PU.

Bukan hanya di pemerintahan, BAKN menilai ada kelalaian oleh kelompok kerja anggaran Komisi Olahraga di Badan Anggaran DPR. Mereka dinilai tak responsif dan tak teliti terhadap perubahan anggaran proyek Hambalang menjadi proyek tahun jamak dalam nota keuangan Kementerian Keuangan. Perubahan itu pun belum dibahas dan disepakati Komisi Olahraga DPR.

Menteri Andi hingga berita ini ditulis belum bisa dimintai konfirmasi. Ketika dihubungi, telepon selulernya tidak aktif. Pesan singkat pun belum dibalas. Namun, dalam beberapa kesempatan, Andi mengaku mengetahui keberadaan proyek Hambalang. "Tetapi, kalau penyimpangan, tidak tahu," ujar dia. Dia juga menyatakan siap

diperiksa.

Anggota Komisi Olahraga DPR, Zulfadli, mengakui adanya kecolongan karena dianggap tak responsif terhadap perubahan anggaran proyek Hambalang. Namun, menurut dia, untuk mengetahui lebih detail, sebaiknya BPK menelusuri kembali dugaan pelanggaran tersebut. Politikus Golkar itu mengatakan, Badan Akuntabilitas tidak sepatutnya berkomentar atas audit BPK. "Seharusnya BAKN membahas dulu dengan Komisi DPR, bukan berkomentar ke publik," ujar dia.

Adapun KPK mengatakan, peran setiap aktor dalam kasus Hambalang bisa lebih jelas dirunut berkat audit BPK. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan saat ini laporan BPK tengah didalami. KPK juga mencari alat bukti untuk menyandingkannya dengan laporan BPK.

● IRA GUSLINA SUFA | ARYANI KRISTANTI | ANANDA BADUDU | TRI SUHARMAN | M. RIZKI